

**STUDI DESKRIPTIF STRATEGI SINGAPURA DALAM MENEKAN  
KETIMPANGAN GENDER**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Zalfa Zahirah  
(1916071058)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## ABSTRAK

### STUDI DESKRIPTIF STRATEGI SINGAPURA DALAM MENEKAN KETIMPANGAN GENDER

Oleh

**ZALFA ZAHIRAH**

Ketimpangan gender di Singapura masih terjadi meskipun Singapura telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sejak tahun 1995. Namun, Singapura mampu menekan *gender inequality index* (GII) secara konsisten dari tahun 2000 hingga mendapat peringkat 7 dunia sebagai negara dengan indeks ketimpangan gender yang rendah pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Singapura dalam menekan GII.

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori liberal institusionalis dan konsep pengarusutamaan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan United Nations Development Programme (UNDP), CEDAW *shadow report*, dokumen-dokumen *The Singapore Council of Women's Organisations* (SCWO), *website* pemerintah Singapura, dan jurnal-jurnal terkait hingga media daring internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Singapura berupaya secara maksimal memenuhi tiga tahapan pengarusutamaan gender yang didukung dengan prinsip meritokrasi yang dianut oleh Singapura. Pertama, Singapura mengadopsi terminologi pengarusutamaan gender dengan meratifikasi CEDAW pada tahun 1995. Kedua, Singapura melakukan pengambilan kebijakan pengarusutamaan gender yang dibuktikan dengan dibentuknya beberapa undang-undang serta inisiatif terkait kesetaraan gender seperti *Women's Charter*, *Employment Act*, dan *White Paper Policy*. Ketiga, Singapura mengimplementasikan pengarusutamaan gender baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Selain kebijakan pemerintah, kerjasama antara institusi regional Singapura seperti SCWO dan institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berperan dalam menyediakan aliran informasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain, serta memperkuat kesolidan dari kesepakatan internasional yang membantu Singapura untuk menyusun strategi dalam menekan ketimpangan gender.

**Kata Kunci:** Singapura, ketimpangan gender, *GII*, pengarusutamaan gender

## ABSTRACT

### DESCRIPTIVE STUDY SINGAPORE'S STRATEGY IN REDUCING GENDER INEQUALITY

By

ZALFA ZAHIRAH

Gender inequality in Singapore still exists although Singapore has ratified *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) since 1995. However, Singapore managed to reduce the *gender inequality index* (GII) consistently from 2000 to be ranked 7th in the world as a country with a low gender inequality index in 2021. This research aims to describe Singapore's strategy in suppressing GII. This research uses the theory of liberal institutionalism and the concept of *gender mainstreaming*. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods and secondary data sources from the United Nations Development Programme (UNDP) report, CEDAW *shadow report*, *Singapore Council of Women's Organisations* (SCWO) documents, Singapore government *website*, and related journals and international online media. The results of this study show that Singapore makes maximum efforts to fulfill the three stages of gender mainstreaming supported by the principle of meritocracy adopted by Singapore. First, Singapore adopted gender mainstreaming terminology by ratifying CEDAW in 1995. Second, Singapore conducts gender mainstreaming decision-making as evidenced by the establishment of several laws and initiatives related to gender equality such as the Women's Charter, Employment Act, and White Paper Policy. Third, Singapore implements gender mainstreaming in the economic, education, health, and political participation sectors. In addition to government policies, cooperation between Singapore's regional institutions such as SCWO and international institutions such as the United Nations (UN) also plays a role in providing information flow, improving the government's ability to monitor other forces, and strengthening the solidity of international agreements that help Singapore to strategize in reducing gender inequality.

**Keywords:** Singapore, gender inequality, GII, Gender Mainstreaming

**STUDI DESKRIPTIF STRATEGI SINGAPURA DALAM MENEKAN  
KETIMPANGAN GENDER**

**Oleh**

**ZALFA ZAHIRAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

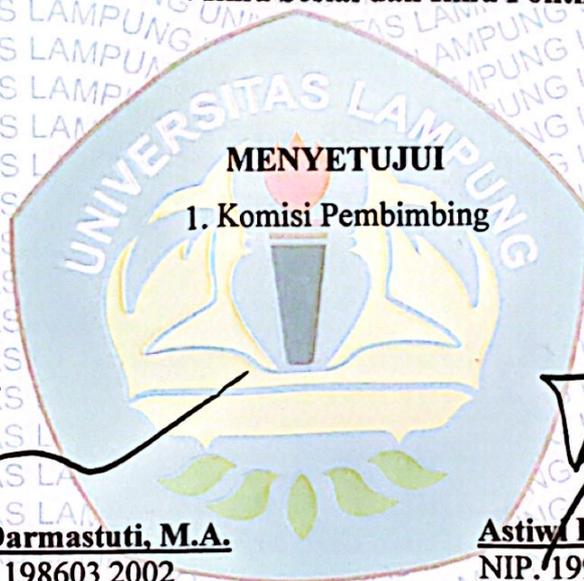
**Judul Skripsi : STUDI DESKRIPTIF STRATEGI SINGAPURA DALAM MENEKAN KETIMPANGAN GENDER**

**Nama Mahasiswa : Zalfa Zahirah**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1916071058**

**Jurusan : Hubungan Internasional**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2002

**Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**  
NIP. 199105022020122020

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

**Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA.**  
NIP. 198106282005011003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua

: Prof.Dr. Ari Darmastuti, M.A.



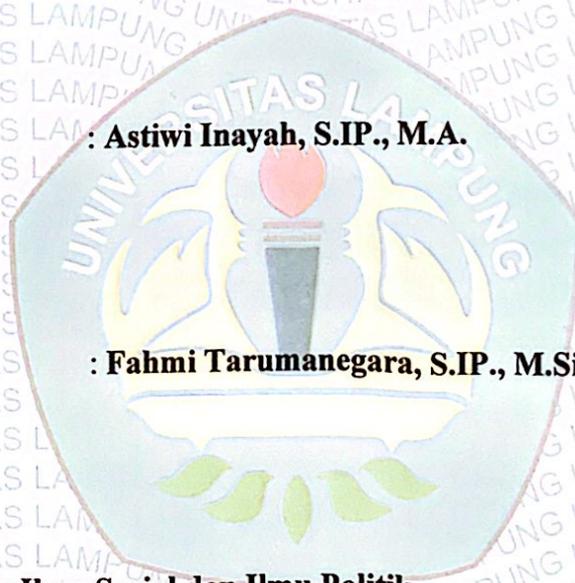
Sekretaris

: Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



Penguji Utama

: Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**

**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Zalfa Zahirah  
NPM. 1916071058

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Zalfa Zahirah, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2001, yang merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Hasratman dan Ibu R. Lilis Yuliati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta (SDS) serta melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yayasan Alkautsar. Penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) bernama *English Society* Unila. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik, seperti menjadi delegasi Hubungan Internasional Universitas Lampung dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII 31) pada 2019, menjadi delegasi Universitas Lampung dalam *Asian Law Students' Association English Competition (ALSA Ecomp)* Universitas Indonesia pada tahun 2019 dan dianugerahi sebagai Juara 3 Lomba Story Telling tingkat Nasional, serta menjadi delegasi Universitas Lampung pada *Asian English Olympic (AEO)* tahun 2020. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program PKL di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah DKI Jakarta, serta pada tahun 2023 penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan magang Grab Lampung khususnya bagian *Business Process Outsourcing (BPO)*.

## **MOTO**

*“Tidak ada yang mudah kecuali Allah kehendaki mudah, dan segala yang sulit akan menjadi mudah, apabila Allah kehendaki”*

*“Namun, (hanya) Allah-lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik”*

**(Q.S Ali ‘Imran: 150)**

*“Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*

**(Q.S Al-Baqarah: 195)**

*“If you never bleed, you never gonna grow”*

**(Taylor Swift)**

*“Long story short, I survived”*

**(Taylor Swift)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan pertolongan, kesehatan, kekuatan, serta kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku

### **Papa Hasratman dan Bunda R.Lilis Yulianti**

Terima kasih atas segala limpahan doa yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menjalani hidup, serta dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis sehingga memberikan kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha yang terbaik. Semoga kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai papa dan bunda. *Barakallahu fiikum*

Kedua Kakak dan Adikku Tersayang

### **Nadya Afradila, Amalia Nabila, dan Nisrina Izzati**

Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selalu meyakinkan penulis untuk terus berjuang mencapai segala mimpi, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan menjadi teman yang menemani penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan perkuliahan. Semoga kesehatan, kebaikan serta keberkahan senantiasa menyertai kalian. *Jazakumullah khairan katsiran.*

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan, anugerah, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul *Studi Deskriptif Strategi Singapura Menekan Ketimpangan Gender* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan karunianya. Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya selama di dunia dan di yaumul akhir kelak;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu dalam membimbing serta mengarahkan penulis untuk menjadi lebih baik dalam penulisan skripsi selama masa perkuliahan, serta selalu memberikan dukungan dan kata-kata penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang senantiasa memberikan nasihat, masukan dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, serta berbagi keceriaan selama proses bimbingan skripsi;
6. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si. M.B.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan wawasan baru, ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan

arahan agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta motivasi agar penulis menjadi pribadi yang semakin baik dan bermanfaat di masa depan;

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Papa Hasratman dan Bunda R.Lilis Yulianti selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kekuatan dalam setiap langkahku, terimakasih sudah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan berusaha mencapai mimpi-mimpi termasuk dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
9. Kakak Nadya, Tete Ela, Dedek Nisrina selalu saudara kandung penulis dan Kak Reyhan selaku kakak ipar penulis yang selalu meluangkan waktu untuk mendoakan, mendengarkan cerita, menemani, serta menguatkan dan menyemangati penulis dalam menjalani kehidupan dan meraih mimpi;
10. Deffan Dericco, terimakasih banyak sudah selalu mendoakan, mendukung, mendengarkan setiap cerita, serta selalu meyakinkan dan menenangkan penulis selama proses pengerjaan skripsi;
11. Anisa Salsabila dan Dita Fatimatuzzahra, yang menjadi sahabat baik yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Terima kasih telah menemani penulis melalui segala kondisi dalam segala suka dan duka, serta selalu saling mendukung dan mendoakan kebaikan untuk satu sama lain sejak pertama kali berkenalan hingga saat ini;
12. Haliza Henfa Della Cruz dan Nabila Fitrianti, selaku teman sekolah penulis yang masih berada satu kota dengan penulis sampai saat ini, terimakasih banyak sudah selalu hadir dan ikut merayakan setiap pencapaian-pencapaian sederhana penulis, terimakasih sudah selalu mendoakan, mendukung, serta menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi dan menjadi tempat nyaman untuk berbagi selama perjalanan ini;
13. Ika, Farraas, Nana, Dennis, Sonya, Yoga, Fira, Bimo, Victoria, Manda yang sudah menjadi teman baik penulis dan mengisi cerita serta berbagi keceriaan serta teman seperjuangan selama masa perkuliahan;

14. Sobat EDU ESo Unila, Hasyika, Dhoni, Dika, Dita, Adysti, dan Dani, terimakasih sudah berbagi cerita, pengalaman, keceriaan, dan saling berbagi informasi bermanfaat serta semangat yang menjadi warna dan cerita tersendiri bagi penulis selama masa perkuliahan;
15. Teman-teman HI '19 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan pada penulis selama masa perkuliahan.
16. Semua pihak yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
17. Terakhir, teruntuk diriku, *Alhamdulillah*, terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan segala hal yang sudah dimulai, terimakasih sudah terus percaya sama diri sendiri untuk berjuang meraih mimpi-mimpi. Meskipun banyak hal terjadi di luar rencana, terimakasih sudah selalu berusaha berprasangka baik sama Allah dan berusaha berlapang dada atas segala jalan-Nya. Terimakasih sudah selalu meyakinkan diri sendiri bahwa Allah-lah sebaik-baik perencana. Perjalanan ke depan masih panjang, semoga selalu menemukan cara untuk tetap berjuang dan bertahan, serta selalu menemukan cara untuk mendapat ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan di setiap prosesnya.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 15 Januari 2025

Penulis

**Zalfa Zahirah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Landasan Konseptual .....	14
2.1.1 Konsep Pengarusutamaan Gender .....	14
2.1.2 Teori Liberalisme Institusional (Kelembagaan Liberal).....	16
2.1.3 Strategi Singapura Menekan GII berdasarkan Teori Liberal Institusional .....	18
2.2 Kerangka Pikir .....	20
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Analisis Data.....	24
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
4.1 Indeks Ketimpangan Gender di Singapura .....	27
4.2. Analisis tahapan pengarusutamaan gender dalam kesetaraan gender di Singapura .....	40
4.2.1 Mengadopsi Terminologi Pengarusutamaan Gender dalam Kesetaraan Gender di Singapura .....	41

4.2.2	Pengambilan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Singapura..	45
4.2.2.1	<i>Political will</i> .....	46
4.2.2.2	<i>Specific Gender Equality Policy</i> .....	48
4.2.2.3	<i>Statistic</i> .....	59
4.2.2.4	<i>Comprehensive Knowledge of gender relations</i> .....	62
4.2.2.5	<i>Necessary Funds and Human Resources</i> .....	66
4.2.2.6	<i>Participation of Women in Political and Public Life Decision Making</i> .....	68
4.2.3	Implementasi Pengarusutamaan Gender di Berbagai Sektor di Singapura.....	70
4.2.3.1	Sektor Ekonomi.....	70
4.2.3.2	Sektor Pendidikan .....	71
4.2.3.3	Sektor Kesehatan.....	72
4.2.3.4	Sektor Partisipasi Politik.....	73
4.3	Strategi Kelembagaan Singapura dalam Menekan Ketimpangan Gender berdasarkan Teori Liberal Institusionalis.....	74
4.3.1	Peran Institusi dalam Menyediakan Aliran Informasi dan Kesempatan Bernegosiasi sebagai Strategi Singapura dalam Menekan Ketimpangan Gender .....	76
4.3.2	Peran Institusi dalam Meningkatkan Kredibilitas Komitmen sebagai Strategi Singapura dalam Menekan Ketimpangan Gender .....	81
4.3.3	Peran Institusi dalam Memperkuat Kesolidan dari Kesepakatan Internasional sebagai Strategi Singapura dalam Menekan Ketimpangan Gender.....	90
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
5.1	Simpulan .....	98
5.2	Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tabel Gender Inequality Index di ASEAN .....	28

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. <i>Gender Inequality Index in Singapore</i> .....	5
Gambar 2. Gender Inequality Index in ASEAN .....	5
Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	21
Gambar 4. Komponen Analisis Data (Interactive Model) .....	24
Gambar 5. <i>Gender Inequality Index in Singapore</i> .....	29
Gambar 6. Dimensi Kesehatan Reproduksi .....	30
Gambar 7. <i>Share of seats in parliament</i> (Dimensi Pemberdayaan) .....	32
Gambar 8. <i>Share of seats in parliament</i> (Dimensi Pemberdayaan) .....	33
Gambar 9. Population with at Least Some Secondary Education (Dimensi Pemberdayaan) .....	35
Gambar 10. <i>Labour Force Participation Rate</i> (Dimensi Pasar Tenaga Kerja) ....	37

## DAFTAR SINGKATAN

1. ABR : *Adolescent Birth Rate*
2. ACWC : *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*
3. ACWO : *ASEAN Confederation of Women's Organisations*
4. AICHR : *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*
5. APEC-WEF : *Asia-Pacific Economic Cooperation Women and the Economic Forum*
6. CCE : *Character and Citizenship Education*
7. CCP : *Career Conversion Programmes*
8. CPF : *Central Provident Fund*
9. ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*
10. AWARE : *Association of Women for Action and Research*
11. BPfA : *The Beijing Declaration and Platform for Action*
12. CEDAW : *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*
13. CSW : *Commission on the Status of Women*
14. GII : *Gender Inequality Index*
15. IMC : *The Inter Ministry Committee*
16. MMR : *Maternal Mortality Ratio*
17. NWM : *National Women's Machinery*
18. PGN : *Practical Gender Needs*
19. SGN : *Strategic Gender Needs*
20. SCWO : *The Singapore Council of Women's Organisations*
21. TAFEP : *Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices*
22. TGFEP : *Tripartite Guidelines on Fair Employment Practice*
23. UDHR : *Universal Declaration of Human Rights*
24. UNDP : *United Nations Development Programme*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang mendasar, pernyataan ini dimuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Dalam deklarasi ini pasal 1 menyatakan bahwa “*semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya*” dan pasal 2 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kelahiran atau status lainnya.*” (United Nations, 2023). Kesetaraan gender penting untuk diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan karena merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendasar dan pondasi yang mendukung kemajuan pembangunan negara, pentingnya perwujudan kesetaraan gender ini menyebabkan lahirnya berbagai kebijakan gender dan pergerakan gender di dunia, sebagai contoh, pada tahun pertama PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk *Commission on the Status of Women* (CSW), sebagai badan pembuat kebijakan global utama yang didedikasikan khusus untuk kesetaraan gender dan kemajuan perempuan (United Nations, 2022).

Kemudian, pada tahun 1975 Majelis Umum mendeklarasikan sebagai tahun perempuan internasional dan menyelenggarakan *World Conference on Women* untuk pertama kalinya yang diadakan di Mexico City, lebih lanjut pada tahun 1976-1995 atas desakan konferensi tersebut, *UN Decade for Women* dideklarasikan, dan membentuk dana sukarela untuk dekade. Adapun salah satu kebijakan yang berpengaruh dalam perjalanan upaya mencapai kesetaraan gender berlangsung pada tahun 1979, pada tahun ini, Majelis Umum mengadopsi *The*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), konvensi ini memuat 30 pasal yang secara eksplisit mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut, selain itu penegasan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia juga dipertegas pada *The Beijing Declaration and Platform for Action* (BPfA) yang merupakan agenda visioner untuk pemberdayaan perempuan yang lahir dari hasil Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan yang diselenggarakan di Beijing, Tiongkok pada bulan September 1995, naskah penting ini berkomitmen pada tindakan khusus untuk memastikan penghormatan pada hak-hak perempuan (United Nations, 2022). Platform aksi ini mencakup 12 bidang penting seperti kemiskinan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan, konflik bersenjata, ekonomi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan, hak asasi manusia, media, lingkungan, dan anak perempuan. Keberadaan BPfA menjadi kerangka kebijakan global yang komprehensif dan menjadi sumber panduan dan inspirasi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak perempuan (UN Women, 2014).

Sejak tahun 1995 baik pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya telah berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta berupaya mencapai kesetaraan gender di semua bidang kehidupan, baik di ruang publik maupun privat. Komitmen CEDAW dan BPfA diadopsi oleh berbagai negara di dunia, hingga saat ini terdapat 189 dari 193 negara anggota PBB yang telah meratifikasi CEDAW (OHCHR, 2024a) dan juga terdapat 189 negara yang turut mengadopsi dan menyetujui komitmen BPfA beserta cakupan di dalamnya (UNDP, 2020). Sejak adanya kerangka kebijakan-kebijakan tersebut, undang-undang yang diskriminatif perlahan dihapuskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta praktik-praktik yang merugikan juga ditangani, keberadaan kerangka kebijakan ini mendorong adanya kemajuan yang signifikan seperti meningkatnya pendaftaran sekolah anak perempuan, pada tahun 1995 rasio pendaftaran anak perempuan terhadap laki-laki di tingkat dasar adalah 0,83 kemudian rasio meningkat menjadi 0,97 pada

tahun 2020, adapun di tingkat pendidikan menengah pada tahun 1995 rasionya adalah 0,77 (UNESCO, 2024). kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,94, serta keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 20% secara global (UN Women, 2014).

Meskipun ditemukan adanya kemajuan sejak adanya kerangka kebijakan tersebut, namun kemajuan menunjukkan progress yang lambat dan tidak merata, terutama bagi perempuan yang paling terpinggirkan yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang saling terkait, sampai saat ini diketahui sudah lebih dari 20 setelah dibentuknya CEDAW dan BPfA, namun hingga kini belum ada satupun negara yang mencapai kesetaraan perempuan dan anak perempuan, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Bidang-bidang penting yang belum mencapai kemajuan yang memadai, antara lain akses terhadap pekerjaan layak dan menutup kesenjangan gaji berdasarkan gender; penyeimbangan kembali beban perawatan; mengakhiri kekerasan terhadap perempuan; mengurangi angka kematian ibu dan mewujudkan kesehatan dan hak seksual dan reproduksi; serta partisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan di semua tingkatan (UN Women, 2014)

Singapura merupakan salah satu negara yang turut menandatangani dan menyetujui CEDAW pada tanggal 5 Oktober 1995 dan komitmen ini mulai berlaku di Singapura pada tanggal 4 November 1995, selain itu Singapura juga turut mengadopsi BPfA pada tahun 1995, namun Singapura juga tidak terlepas dari permasalahan gender, berdasarkan data yang dilansir melalui *website National Library Board Singapore*, dilaporkan bahwa sekitar 70% wanita di Singapura setuju bahwa diskriminasi gender ada di tempat kerja. Dalam bidang kesenjangan gaji berdasarkan gender, Singapura juga masih mengalami ketimpangan, pada tahun 2020 dilaporkan bahwa pendapatan wanita di Singapura 4,3% lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, wanita di Singapura juga kerap mendapatkan kekerasan baik secara fisik, seksual, maupun daring, data pada tahun 2021, menunjukkan bahwa 2 dari 5 pekerja wanita mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja dalam lima tahun sebelumnya. Pelecehan ini

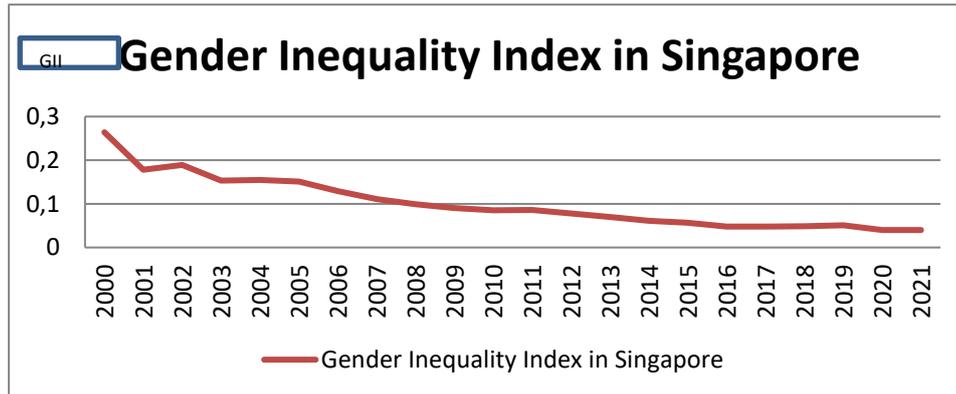
juga tidak hanya terjadi di tempat kerja namun juga meluas ke ruang daring, dilaporkan bahwa terdapat 163 kasus baru kekerasan seksual terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi pada tahun 2021 (NLB, 2021).

Terlepas dari permasalahan gender yang dihadapi Singapura, nyatanya Singapura juga dinilai sebagai negara yang cukup mampu mengupayakan penegakan ketimpangan gender secara konsisten, hal ini dilihat dari berdasarkan perhitungan GII yang dikeluarkan oleh UNDP. GII sendiri merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender dalam lingkup global, Indeks ini mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan 3 dimensi dasar, yaitu (UNDP, 2022):

- 1) Kesehatan reproduksi, yang diukur dengan rasio kematian ibu dan angka fertilitas remaja;
- 2) Pemberdayaan, dimensi ini diukur dengan porsi kursi parlemen yang dipegang oleh setiap jenis kelamin dan dengan tingkat pencapaian pendidikan menengah dan tinggi;
- 3) Pasar Tenaga Kerja, yang diukur dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja

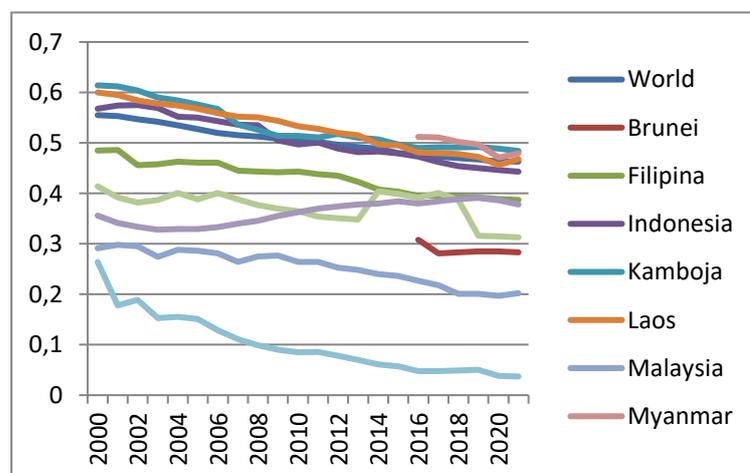
Nilai GII sendiri diukur dengan kisaran angka 0 hingga 1, nilai kisaran 0 diartikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan nilai yang setara, sedangkan nilai kisaran 1 diartikan bahwa adanya ketimpangan gender yang cukup tinggi dimana salah satu gender memiliki nilai yang paling buruk dalam semua dimensi yang diukur. Dengan kata lain, nilai GII yang rendah menunjukkan ketimpangan yang rendah antara laki-laki dan perempuan, begitupun sebaliknya (UNDP, 2021). Berdasarkan laporan *Human Development Report* (HDR) tentang ketimpangan gender yang diukur melalui GII, Singapura diketahui secara konsisten berupaya menekan ketimpangan gender di negaranya, penurunan ketimpangan gender secara konsisten ini dapat terlihat dari tahun 2000 hingga tahun 2021. Pada tahun 2000, Singapura memperoleh *GII value* dengan skor 0,275, skor tersebut secara konsisten terus menurun hingga ke tahun-tahun berikutnya, adapun pada tahun 2001 skor GII Singapura mengalami penurunan yang cukup

banyak yaitu dengan skor 0,190 dan semakin menurun hingga tahun 2018 skor GII mencapai 0,049 namun ada sedikit kenaikan skor GII pada tahun 2019 hanya saja tidak begitu signifikan yaitu menjadi 0,050. Meskipun begitu, ditahun berikutnya Singapura kembali berhasil menekan ketimpangan gender dengan angka yang cukup signifikan yaitu mencapai skor 0,038 pada tahun 2020 dan 0,037 pada tahun 2021.



Gambar 1. *Gender Inequality Index in Singapore*  
Sumber: (UNDP, 2022)

Bahkan Singapura dilaporkan sebagai negara dengan perolehan skor GII terendah diantara negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lainnya, nilai rata-rata GII untuk 10 negara kawasan ASEAN (Indonesia, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Singapura) pada tahun 2021 hanya mencapai 0,345 dari skala 0-1 (UNDP, 2022).



Gambar 2. *Gender Inequality Index in ASEAN*  
Sumber: (UNDP, 2022).

Grafik di atas menunjukkan data perolehan rata-rata GII di dunia dan perolehan GII negara-negara ASEAN sejak tahun 2000 hingga tahun 2021. Skor GII di dunia pada tahun 2000 dilaporkan memperoleh skor 0,555 kemudian mengalami penurunan mencapai 0,463 pada tahun 2021, perolehan skor GII sendiri dihitung dari skala 0-1, perolehan GII dalam lingkup global menunjukkan angka yang mendekati nilai kisaran 1, hal tersebut diartikan bahwa adanya ketimpangan gender yang cukup tinggi dimana salah satu gender memiliki nilai yang paling buruk dalam semua dimensi yang diukur. Berdasarkan grafik di atas, Singapura menunjukkan perolehan skor GII yang terus menurun tiap tahunnya, Singapura merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang secara konsisten berhasil menekan GII sejak tahun 2004 hingga tahun 2021, dimana pada tahun 2004 perolehan skor GII di Singapura adalah 0,155 kemudian menurun cukup signifikan hingga mencapai skor 0,037 pada tahun 2021. Perolehan skor GII di Singapura mengindikasikan angka yang mendekati skala 0, hal ini berarti bahwa ketimpangan gender di Singapura cukup rendah yang menandakan bahwa Singapura memperoleh perhitungan gender yang baik dalam semua dimensi yang diukur, secara singkat nilai GII yang rendah menunjukkan ketimpangan yang rendah antara laki-laki dan perempuan (UNDP, 2022).

Berdasarkan laporan UNDP dari tiga dimensi yang diukur dalam GII (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja) Singapura cukup unggul dalam hal kesehatan reproduksi, hal tersebut terlihat dari rendahnya angka rasio kematian ibu dan fertilitas remaja. Kemudian pada dimensi pemberdayaan, jumlah porsi kursi parlemen yang dipegang oleh perempuan di Singapura juga termasuk unggul dengan angka 29,8% dimana rata-rata negara-negara di kawasan ASEAN sebesar 20,38%, selain itu tingkat pencapaian pendidikan menengah dan tinggi memiliki skor yang cukup baik dimana Singapura dapat menekan ketimpangan pada indikator ini dengan menjaga ketimpangan di angka 5%. Pencapaian skor tersebut mengantarkan Singapura berhasil meraih peringkat 7 sebagai negara terbaik dalam perolehan GII dan menjadi satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang mendapatkan peringkat 10 besar (UNDP, 2022). Selain itu, data dari *Women, Peace and Security Index* yang melaporkan bahwa

Singapura berhasil menjadi negara terbaik bagi perempuan di Asia pada tahun 2021 (GIWPS, 2021). Dalam hal ini, kesetaraan gender menjadi persoalan penting bagi suatu negara, selain menjadi hak dasar manusia, pemberian akses dan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, partisipasi politik, ataupun pemberdayaan berperan besar dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara, dengan begitu, upaya dalam menekan ketimpangan gender penting untuk dilakukan dikarenakan keberhasilan pembangunan suatu negara juga bergantung pada bagaimana kualitas sumber daya manusia yang terdiri laki-laki dan perempuan di dalamnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif bagaimana strategi Singapura dalam menekan ketimpangan gender sehingga berhasil menekan *gender inequality index*. Penelitian ini penting untuk diteliti karena memberikan akses dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan akan menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai strategi Singapura dalam menekan ketimpangan gender serta pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender dalam aspek kehidupan yang menunjang kesejahteraan suatu negara. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam menyusun penelitian ini. Pada sub-bab ini, peneliti mengkaji lima jurnal yang berkaitan dengan topik terkait, yaitu mengenai kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender pada suatu negara:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Shirlena Huang dan Kamalini Ramdas pada tahun 2019 (Huang & Ramdas, 2019). Penelitian ini secara deskriptif membahas tentang perkembangan geografi gender dan feminis di Singapura khususnya di National University of Singapore (NUS). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ruang-ruang generatif, seperti ruang kelas dan lapangan penelitian telah memfasilitasi perkembangan geografi feminis

dan aktivisme di Singapura. Penelitian ini memaparkan bahwa ruang kelas digunakan sebagai ruang untuk meningkatkan kesadaran gender, berdiskusi terkait isu-isu feminis kontemporer serta mendorong mahasiswanya untuk terlibat dalam aktivisme melalui tugas-tugas dalam kelas, adapun lapangan penelitian dalam jurnal ini dengan bagaimana pengalaman pribadi dan keterlibatan dalam penelitian lapangan telah membentuk agenda penelitian feminis para penulis, sebagai contoh penelitian tentang pekerja rumah tangga migran dan pernikahan di Asia. Penelitian ini secara implisit menunjukkan ketimpangan gender di Singapura melalui diskusi yang berkaitan dengan *pink-collar ghettos* atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang secara historis dipegang oleh perempuan yang umumnya bergaji rendah dan kurang prestise, selain itu beban ganda yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, serta dominasi perspektif barat dalam wacana akademis menjadi permasalahan ketimpangan gender yang dihadapi oleh Singapura. Dalam penelitiannya, peneliti berargumentasi bahwa perlunya pendekatan relasional yang membawa kita melampaui teori sudut pandang feminis, jurnal ini juga berpendapat bahwa Singapura perlu menekankan pentingnya terlibat dalam perdebatan feminis internasional dan penggunaan ruang generatif, khususnya di ruang kelas dan bidang penelitian, untuk mendorong perubahan feminis di lingkungan akademis dan komunitas yang lebih luas.

*Kedua*, penelitian ini dilakukan oleh Netina Tan pada tahun 2016 (Tan, 2016). Jurnal ini membahas mengenai mengapa reformasi gender diadopsi di Singapura dan bagaimana hal tersebut memengaruhi peningkatan jumlah perempuan di jabatan politik. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah pragmatisme politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam jurnal ini, peneliti berargumentasi bahwa bahwa pragmatisme *People's Action Party's* (PAP) yang mendorong reformasi gender di Singapura, selain itu urgensi elektoral untuk tampil progresif dan bersahabat kepada perempuan sehingga dapat menarik suara pemilih dari kaum muda untuk mempertahankan hegemoninya juga mendorong reformasi gender itu sendiri. Jurnal ini memaparkan bahwa faktor-faktor yang

mendorong reformasi gender adalah perubahan demografi yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pemilih dari kalangan muda yang menyebabkan PAP menyesuaikan diri agar tetap relevan, kemudian sistem pemilihan di Singapura yang meliputi *Group Representative Constituencies* (GRCs) yang memudahkan partai untuk mengikutsertakan kandidat perempuan dan minoritas dalam daftar calon mereka, serta pragmatisme partai yang ditunjukkan dengan PAP sebagai partai yang pragmatis bersedia mengubah pendirian mereka demi kepentingan politik. Dalam penelitiannya, penulis menyoroti bahwa ketimpangan gender masih terjadi di Singapura yang ditandai dengan jumlah perempuan yang masih sangat rendah di posisi menteri dan jabatan tinggi lainnya, kemudian stereotip gender dan norma sosial masih sangat melekat di masyarakat Singapura sehingga menyebabkan pembatasan minat dan kesempatan perempuan untuk masuk ke dunia politik, serta tanggung jawab keluarga yang lebih besar diemban oleh perempuan membatasi energi mereka dalam berpartisipasi dalam politik, jurnal ini memaparkan perlu upaya lebih lanjut untuk mengubah norma sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam politik (Tan, 2016).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Vincent Chua, Mathews Mathews, dan Yi Cheng Loh pada tahun 2016 (Chua et al., 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kategori deskriptif gender dan etnis berhubungan dengan jenis dan jumlah modal sosial yang dimiliki individu di Singapura, serta menguji bagaimana input seperti pendidikan mempengaruhi modal sosial secara berbeda berdasarkan gender dan etnis, dalam jurnal ini para penulis mengkaji modal sosial yang didefinisikan sebagai sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial dan memiliki berbagai pengaruh terhadap aspek kehidupan, seperti kesehatan, sistem pendukung, dan peluang karir. Metode penelitian ini menggunakan data survei dari 3128 responden di Singapura. Modal sosial diukur berdasarkan pengetahuan responden akan orang-orang yang bekerja di 20 jenis pekerjaan berbeda, yang merepresentasikan berbagai tingkat prestise. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik biner dan regresi binomial negatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan gender terkait akses modal

sosial, meskipun tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam modal sosial secara umum, namun terdapat perbedaan dari jenis modal sosial yang dapat mereka akses, misalnya perempuan memiliki akses yang lebih besar terhadap kontak pekerjaan yang sejalan dengan pekerjaan yang didominasi oleh perempuan, seperti perawat, guru, dan kasir, menurut penelitian ini akses perempuan terhadap pekerjaan tertentu secara positif dipengaruhi oleh pola, sedangkan, laki-laki cenderung memiliki pola pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki, seperti pegawai bank, penjaga keamanan, dan lain-lain, peran dan status tinggi yang dipegang oleh laki-laki. Selain itu, pengaruh pengasuhan anak, pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang juga memengaruhi dan berdampak pada kesempatan laki-laki dan perempuan dalam membangun modal sosial mereka, jurnal ini memaparkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut untuk mengatasi segregasi pekerjaan berdasarkan gender dan mendorong perubahan norma sosial yang membatasi perempuan dan kelompok minoritas (Chua et al., 2016)

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Athiqah Nur Alami pada tahun 2018 (Alami, 2018). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi *gender mainstreaming* di ASEAN serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan *gender mainstreaming* terutama dalam kebijakan negaranya (Alami, 2018). Konsep yang digunakan pada jurnal ini adalah konsep *gender mainstreaming* dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif analisis. Dalam jurnal ini peneliti mengkaji implementasi *gender mainstreaming* melalui tiga tahap, yaitu: mengadopsi terminologi kesetaraan gender dan *gender mainstreaming* dalam proses organisasi, pengadopsian *gender mainstreaming* dalam kebijakan atau program kelembagaan, dan implementasi kebijakan *gender mainstreaming*. Dalam penelitiannya, Alami berargumentasi bahwa penerapan *gender mainstreaming* di Asia Tenggara belum banyak dieksplorasi. Selain itu, dalam tulisannya, Alami sependapat dengan Mahapatro (2014) yang menyebut bahwa *gender mainstreaming* adalah sebuah proses yang “kompleks” dan “berkelanjutan” untuk mencapai *gender mainstreaming* dalam kebijakan yang

buta gender. Lebih lanjut, dalam jurnal ini dibahas bahwa salah satu upaya untuk mengadopsi *gender mainstreaming* adalah melalui pembentukan unit atau divisi khusus dalam lembaga yang menangani masalah perempuan dan gender. Selain itu, dikarenakan *gender mainstreaming* merupakan sebuah proses maka cara lain mengadopsinya adalah dengan pembangunan kapasitas seperti yang nampak pada proses organisasi (Alami, 2018).

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Daniel C.M Low, Helen Roberts, dan Rosalind H. Whiting pada tahun 2015 (Low et al., 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara keragaman gender di dewan direksi dan kinerja perusahaan serta menguji apakah manfaat keragaman gender berkurang di negara-negara dengan budaya yang kurang mendukung kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *two-stage least squares* (2SLS) untuk mengatasi masalah endogenitas, sumber data pada penelitian diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2012 dan 2013 dan Kinerja perusahaan diukur dengan *return on equity* (ROE). Penelitian ini membahas aspek ketimpangan seperti ketimpangan gender dalam kepemimpinan perusahaan, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa representasi perempuan di dewan direksi perusahaan di Asia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Barat, kemudian adalah pengaruh budaya patriarki, hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa di negara-negara dengan resistensi budaya yang kuat terhadap kesetaraan gender, penambahan direktur perempuan mungkin hanya bersifat "tokenism" dan tidak berdampak signifikan pada kinerja perusahaan. Adapun peran tokenism adalah praktik menunjuk sejumlah kecil perempuan ke dewan direksi hanya sebagai pemenuhan formalitas atau menciptakan kesan keberagaman tanpa memberikan mereka kekuasaan atau pengaruh yang sesungguhnya. Hasil dari penelitian ini memaparkan peningkatan jumlah direktur perempuan di dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (ROE). Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa di negara-negara di mana perempuan sudah lebih berdaya secara ekonomi, penunjukan direktur

perempuan tambahan mungkin hanya bersifat *tokenism* dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (Low et al., 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu negara Singapura dan mengkaji aspek gender yang terjadi di Singapura, namun adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian-penelitian di atas, perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang penulis teliti. Pada penelitian terdahulu, penulis dalam jurnal tersebut menekankan pembahasan tentang ketimpangan gender pada aspek dewan direksi, modal sosial, ataupun reformasi gender serta membahas perkembangan gender di Singapura kemudian bagaimana dampaknya pada berbagai aspek kehidupan, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini lebih berfokus pada dinamika ketimpangan gender di Singapura yang diukur dengan *gender inequality index* kemudian menganalisis strategi Singapura sehingga dapat menekan indeks ketimpangan gender tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Ketimpangan gender merupakan isu yang sampai saat ini dihadapi oleh negara-negara di dunia. Meskipun telah ada komitmen internasional yang mengatur upaya pencapaian kesetaraan gender, nyatanya kesenjangan masih terjadi secara signifikan, namun Singapura merupakan salah satu negara yang cukup konsisten menekan ketimpangan gender dengan capaian indeks ketimpangan gender yang paling rendah di ASEAN dan mendapatkan peringkat 7 di dunia sebagai negara dengan ketimpangan gender yang rendah. Oleh karena adanya kesenjangan (gap) tersebut memunculkan pertanyaan penelitian: “Bagaimana strategi Singapura dalam menekan ketimpangan gender?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Mendeskripsikan indeks ketimpangan gender di Singapura
- b) Mendeskripsikan upaya dan kebijakan gender di Singapura
- c) Mendeskripsikan strategi Singapura dalam menekan ketimpangan gender sehingga dapat menekan *gender inequality index*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam kajian studi hubungan internasional terutama pada kajian gender khususnya mengenai isu ketimpangan gender yang diukur melalui *gender inequality index* dan menjabarkan strategi Singapura dalam menekan *gender inequality index* yang dianalisis menggunakan konsep pengarusutamaan gender dan teori liberal institusionalis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Konseptual

#### 2.1.1 Konsep Pengarusutamaan Gender

Istilah pengarusutamaan gender pertama kali diadopsi pada Konferensi PBB Sedunia ke IV tentang perempuan tahun 1995 di Beijing. Strategi pengarusutamaan gender secara eksplisit didukung dalam *The Beijing Declaration and Platform for Action* yang menyerukan promosi kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam deklarasi tersebut berulang kali dinyatakan bahwa “pemerintah dan aktor lain harus mempromosikan kebijakan pengarusutamaan perspektif gender yang aktif dan terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga, sebelum keputusan diambil, dilakukan sebuah analisis terkait pengaruh dari masing-masing laki-laki dan perempuan” (UNHCR, 1998).

Secara definisi, setiap ahli memiliki pengertian dan menyorot aspek yang berbeda-beda perihal pengarusutamaan gender, meskipun begitu, ada satu konsensus yang disepakati terkait definisi pengarusutamaan gender. Sebagian besar kelompok ahli menyetujui definisi pengarusutamaan gender yang didefinisikan oleh (UNHCR, 1998), yaitu “(Re)organisasi, perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan sehingga perspektif kesetaraan gender dimasukkan ke dalam semua kebijakan di semua tingkatan dan di semua tahapan, oleh para aktor yang biasanya terlibat dalam pembuatan kebijakan” (UNHCR, 1998). Berdasarkan definisi di atas, pengarusutamaan gender dimaksudkan mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender di semua tahapan dan tingkat kebijakan, program dan proyek di negaranya masing-masing. Tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mempertimbangkan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan tersebut ketika merancang, melaksanakan dan

mengevaluasi kebijakan, program dan proyek agar menguntungkan baik laki-laki dan perempuan sehingga memecahkan ketidaksetaraan gender yang masih terjadi (UNHCR, 1998).

Menurut Caroline Moser dan Annalise Moser, ada tiga tahap dalam praktik pengarusutamaan gender, yaitu (Moser & Moser, 2005):

### **1) Mengadopsi terminologi pengarusutamaan gender**

Kebijakan dan program yang digagas oleh pemerintah dalam berbagai bidang baik politik, sosial, dan ekonomi perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing gender sehingga baik laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Pembentukan unit atau divisi khusus di lembaga yang menangani masalah perempuan dan gender merupakan salah satu upaya untuk mengadopsi pengarusutamaan gender (Dewi, 2021).

### **2) Pengambilan kebijakan pengarusutamaan gender**

Apabila suatu institusi telah melakukan pembentukan unit khusus sebagai upaya mengadopsi konsep pengarusutamaan gender, maka langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan pengarusutamaan gender.

Adapun prasyarat penting untuk pengarusutamaan gender, yaitu:

- 1) *Political will;*
- 2) *Specific gender equality policy;*
- 3) *Statistic;*
- 4) *Comprehensive Knowledge of Gender Relation;*
- 5) *Necessary funds and human resources;*
- 6) *Participation of women in political and public life and in decision making processes.*

### **3) Implementasi pengarusutamaan gender**

Setelah dua tahap di atas telah dilakukan, maka langkah terakhir dalam strategi pengarusutamaan gender adalah mengimplementasikan pengarusutamaan gender, dalam tahap ini tantangan terlihat pada sebagian besar praktik, baik secara kelembagaan dan operasional. Dimana kegiatan kelembagaan menangani dinamika internal pembangunan organisasi seperti

sistem, prosedur, struktur, dan kebijakan. Sedangkan kegiatan operasional membahas kebutuhan untuk mengubah program kerja dimana organisasi terlibat (Dewi, 2021).

Konsep pengarusutamaan gender ini penulis gunakan dalam penelitian untuk membantu penulis mengetahui bagaimana Singapura melakukan tahapan pengarusutamaan gender dan bagaimana Singapura menjalankan enam aspek dalam tahapan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender kemudian setelah penulis mengidentifikasi, penulis akan melihat bagaimana implementasi pengarusutamaan gender serta program atau kebijakan gender apa saja yang berjalan di Singapura sehingga dapat mendukung penekanan ketimpangan gender di Singapura.

### **2.1.2 Teori Liberalisme Institusional (Kelembagaan Liberal)**

Teori liberalisme institusional merupakan teori yang digagas Robert Keohane dan Joseph Nye sebagai alternatif untuk realisme dalam teori hubungan internasional, teori ini telah memicu perdebatan antara ilmuwan sejak tahun 1970 tentang legitimasi liberal institusi sebagai alternatif nyata untuk realisme (Ramli, 2022). Menurut kaum liberal institusional, institusi internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu, institusi ini dapat bersifat universal dengan keanggotaan global, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau institusi bersifat regional atau subregional, seperti Uni Eropa, ASEAN, dan lain-lain (Jackson & Sorensen, 2013). Kaum liberal institusional berpendapat bahwa institusi internasional dapat menolong memajukan kerja sama di antara negara-negara (Jackson & Sorensen, 2013). Penekanan kekuatan kerja sama yang lebih besar menurut liberalisme institusionalis adalah melalui bentuk dan prosedur hukum internasional dan organisasi internasional.

Menurut Robert Keohane, liberal institusional memiliki tiga peran institusi, yaitu (Keohane, 1989):

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi,
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri-oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama,
3. Memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional.

Berdasarkan teori ini, organisasi-organisasi internasional menyebabkan adanya interaksi antara aktor dan non-aktor yang mendekatkan hubungan mereka dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, hal ini kemudian memicu liberalisme institusional juga berfokus pada gagasan interdependensi atau saling ketergantungan, adanya gagasan interdependensi antar aktor dalam organisasi ini dapat meminimalisir konflik dan krisis antar anggota organisasi dikarenakan masing-masing anggota memiliki kepentingan bersama, sehingga segala aktivitas tidak hanya membahas kepentingan individu melainkan kepentingan bersama, selain memberikan informasi, adanya institusi juga dapat menekan biaya transaksi, membuat komitmen lebih kredibel, menetapkan titik fokus untuk koordinasi, dan secara umum memfasilitasi pengoperasian timbal balik (Keohane & Martin, 1995). Pendekatan yang digunakan oleh teori liberalisme institusionalis menekankan pada perdamaian dan kerjasama melalui implementasi kebijakan, keputusan dan reaksi terhadap permasalahan yang muncul (Ramli, 2022). Asumsi dasar teori institusional ini menyatakan bahwa politik internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu keamanan dan ekonomi politik, dan liberalisme institusional pemberlakuan utamanya pada ekonomi politik (Keohane and Martin, 1995).

Berdasarkan penjabaran di atas, teori ini memiliki beberapa asumsi dalam melihat fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, namun dalam penelitian ini penulis berfokus menggunakan teori liberalisme institusional ini untuk melihat bagaimana peran institusi berjalan di Singapura dimana menurut Keohane adanya institusi dapat berperan dalam menyediakan menyediakan aliran

informasi dan kesempatan bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, serta institusi dapat berperan memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional. Selain itu penulis juga akan menggunakan pendekatan pada teori liberal institusional sebagai alat untuk menganalisis strategi Singapura dalam menangani ketimpangan gender dengan melihat bagaimana kerja sama melalui implementasi kebijakan yang dilakukan Singapura dalam menangani ketimpangan gender sehingga dapat menekan *gender inequality index*. Dalam hal ini penulis akan melihat lebih lanjut bagaimana pemerintah Singapura bekerjasama dengan institusi regional hingga internasional guna mendukung upaya kesetaraan gender di Singapura.

### **2.1.3 Strategi Singapura Menekan GII berdasarkan Teori Liberal Institusional**

Program-program terkait kesetaraan gender merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan gender dalam rangka menuju pembangunan yang lebih inklusif untuk mencapai kesetaraan gender. Menurut kaum liberalisme institusional, institusi internasional membantu untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara, selain itu keberadaan institusi internasional dapat mengatur negara-negara anggotanya dengan aturan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggotanya demi kepentingan bersama (Jackson & Sorensen, 2013). Lebih lanjut teori ini beranggapan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional dimana negara merupakan aktor rasional yang terus berupaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam bidang apapun, namun negara bukanlah aktor yang sangat berpengaruh, dalam suatu konflik, negara dapat menyerahkan sumber dayanya kepada institusi, dengan anggapan dapat menguntungkan satu sama lain serta dapat memenuhi kepentingan nasionalnya (Lamy, 2011).

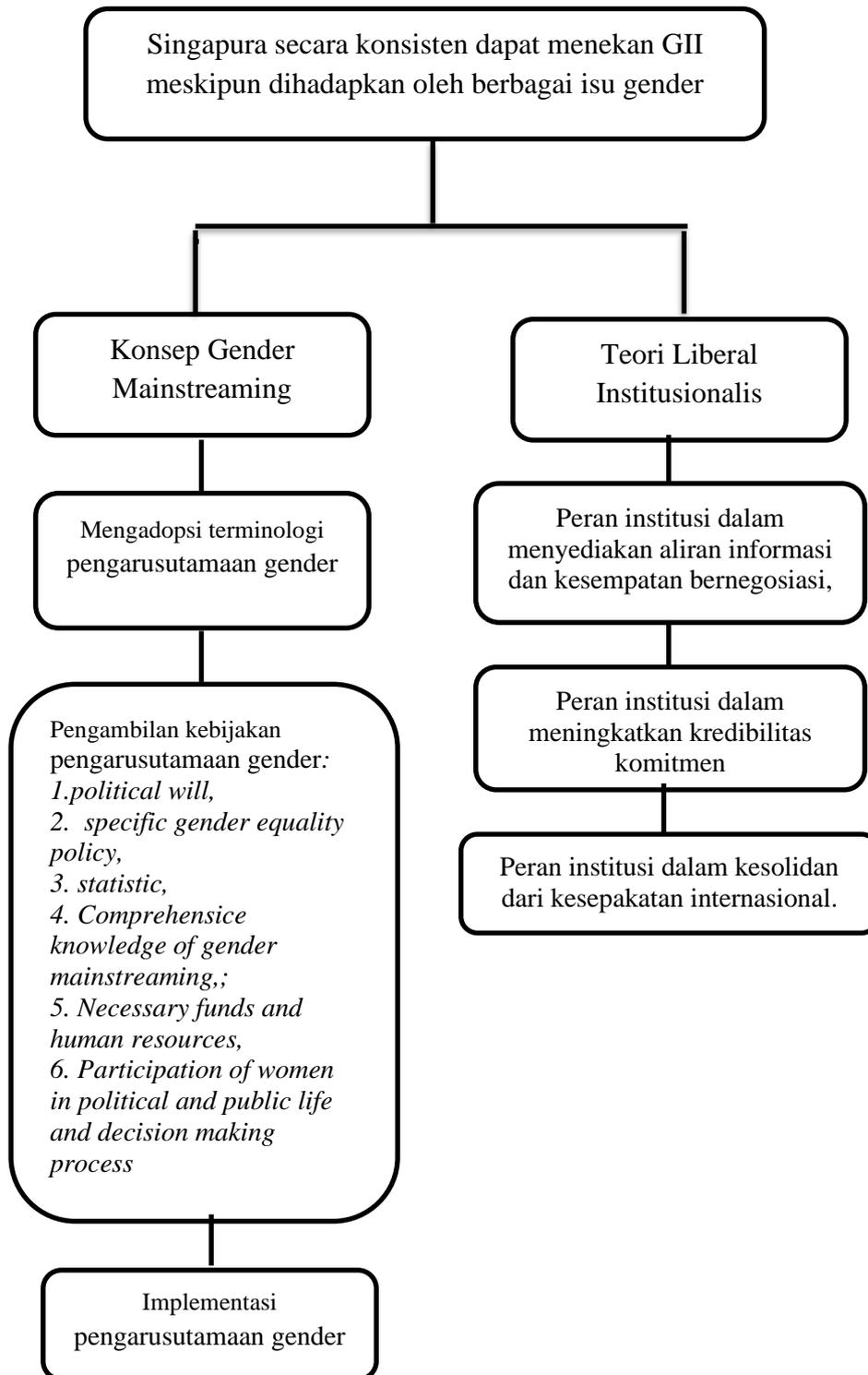
Teori liberal institusionalis berargumentasi bahwa untuk mencapai suatu tujuan, negara harus mengesampingkan egoismenya untuk diintervensi oleh institusi internasional, dimana kesamaan tujuan menjadi dasar bagi negara-negara

untuk senantiasa menjalin kerja sama dalam keterikatannya dengan institusi (Alfatih et al., 2017). Pada penelitian ini, penulis menganalisis peran institusi dari teori liberal institusionalis untuk melihat lebih lanjut bagaimana pemerintah Singapura bekerjasama dengan institusi regional hingga internasional guna mendukung upaya kesetaraan gender di Singapura sebagai strategi Singapura dalam menekan ketimpangan gender melalui tiga peran institusi yang disebutkan oleh Keohane, antara lain peran institusi dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi, peran institusi dalam meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmen sendiri, serta peran institusi dalam memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional (Keohane, 1989).

Dalam menganalisis peran institusi dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi, penulis menganalisis dengan melihat lebih lanjut kerjasama pemerintah Singapura dengan institusi regional maupun internasional internasional yang berperan penting dalam menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan ketimpangan gender, penyebab hingga cara penggunaannya, lebih lanjut institusi internasional juga membantu menjembatani negara-negara dengan permasalahan yang sama, penulis juga melihat komitmen Singapura dalam mengadopsi instrumen internasional seperti CEDAW dengan menjalankan pasal-pasal yang telah diratifikasi oleh Singapura terutama yang berkaitan dengan indikator GII. Kemudian, dalam menganalisis peran institusi dalam meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain, penulis melihat peran institusi dalam memonitor kekuatan internal dan kekuatan eksternal sebagai salah satu bentuk keuntungan kerjasama internasional. Selain itu, dalam menganalisis peran institusi dalam memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional akan dijabarkan melalui peran institusi secara substansial dan praktikal yang terjadi di Singapura.

## 2.2 Kerangka Pikir

Meskipun dihadapkan oleh berbagai permasalahan gender, Singapura diketahui cukup konsisten dalam menangani ketimpangan gender, grafik GII value di Singapura cenderung terus menurun dari tahun 2000 dan berhasil menjadi negara dengan GII value terendah di ASEAN dan peringkat 7 dunia. Dengan menggunakan konsep pengarusutamaan gender dan teori liberal institusional, penulis akan meneliti lebih dalam bagaimana Singapura melakukan tahapan pengarusutamaan gender di negaranya, kemudian perspektif teori liberal institusional dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana institusi baik institusi regional maupun internasional berperan dalam bekerja sama dengan pemerintah Singapura guna mendukung kesetaraan gender sehingga dapat dalam menekan *gender inequality index* di Singapura.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Hasil olah data penulis

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang berangkat dari masalah sosial atau manusia dimana analisis data dilakukan secara induktif dari tema khusus ke tema umum (Creswell, 2014). Pada penelitian ini penulis berupaya untuk memahami peristiwa yang terjadi secara mendalam dengan fokus pertanyaan “bagaimana” lalu penulis berusaha menampilkan “gambaran” penelitian secara rinci dan mendalam (Newman, 2014). Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep pengarusutamaan gender untuk menjabarkan tahapan-tahapan pengarusutamaan gender yang dilakukan Singapura sebagai upaya dalam mendukung kesetaraan gender dan kebijakan apa saja yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Singapura lalu dianalisis menggunakan teori liberal institusionalis untuk melihat bagaimana peran institusi membantu pemerintah Singapura dalam mendukung kesetaraan gender sehingga dapat menekan *gender inequality index*.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi Singapura dalam menekan *gender inequality index*. Dalam melakukan penelitian, sudut pandang konsep pengarusutamaan gender juga diperlukan untuk melihat bagaimana Singapura melakukan tahapan-tahapan pengarusutamaan gender dan program atau kebijakan apa saja yang Singapura lakukan dalam melaksanakan tahapan tersebut, selain itu penulis menggunakan strategi kelembagaan liberal institusionalis sebagai alat

analisis topik yang penulis angkat, khususnya pada tiga peran institusi yang disampaikan oleh Keohane dalam teori liberal institusionalis (Keohane, 1989), yaitu peran institusi dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, serta peran institusi dalam memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional. Organisasi internasional sebagai penguat kerja sama dapat membantu penulis melihat langkah strategis yang dilakukan Singapura baik secara kebijakan domestik maupun kajian hubungan internasional yang dilakukan oleh Singapura dalam menangani ketimpangan gender. Kebijakan-kebijakan terkait kerangka hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan upaya mencapai kesetaraan gender akan menjelaskan hasil akhir berupa *gender inequality index* yang rendah di Singapura.

Selain itu, penulis juga berfokus melakukan penelitian pada *gender inequality index* dikarenakan penulis melihat adanya grafik GII yang terus menurun secara konsisten sejak tahun 2000 namun sempat naik pada tahun 2019 namun kembali menurun dan semakin rendah pada tahun 2020-2021. Selain itu penelitian ini fokus membahas negara Singapura sebagai objek penelitian dikarenakan pada data *gender inequality index* yang dikeluarkan oleh UNDP menunjukkan bahwa Singapura merupakan negara dengan peringkat 7 dari 163 negara dengan GII yang rendah dan menjadi negara anggota ASEAN dengan GII terendah, dimana rendahnya GII menunjukkan bahwa angka kesetaraan gender di Singapura cukup baik.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan yang berasal dari laporan, dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber daring yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan data-data yang bersumber dari website resmi seperti UNDP, UN Women, *White Paper Policy* dan *Singapore Council of Women's Organisation (SCWO)*. Selain itu, penulis juga

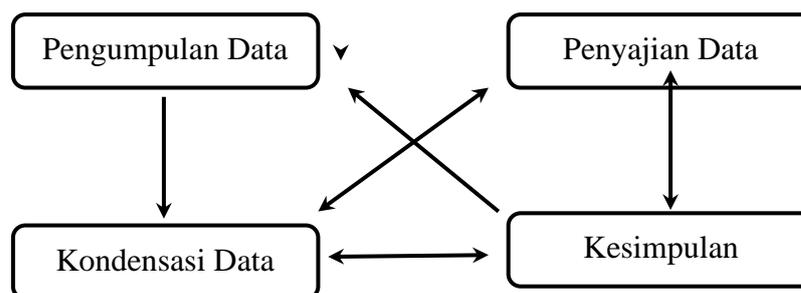
menggunakan dokumen CEDAW *shadow report*, serta jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional terkait topik yang penulis angkat, serta sumber daring lainnya yang akurat dan terpercaya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka atau dokumentasi untuk diterapkan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, penulis mengumpulkan dan mempelajari serta menelaah lebih lanjut terkait data-data dan informasi yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber dokumen baik *website*, laporan, jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta media daring lainnya yang terpercaya. Data yang penulis kumpulkan berupa data terkait *gender inequality index* di Singapura yang bersumber dari *website* resmi UNDP, laporan terkait, data atau informasi terkait laporan dokumen-dokumen atau kerangka hukum dan kelembagaan terkait kesetaraan gender di Singapura seperti dokumen-dokumen SCWO dan *shadow report* CEDAW. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan penulis analisis dan penulis gunakan sebagai landasan yang menunjang ketajaman argumen yang akan penulis gunakan dalam hasil penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data *interactive model* yang digagas oleh Huberman. Menurut Huberman (2014) terdapat 3 komponen dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: 1) Kondensasi data, 2) Display data, 3) Kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.



Gambar 4. Komponen Analisis Data (Interactive Model)

Sumber: (Miles et al., 2014).

### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan pertama yaitu kondensasi data, tahapan ini merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang berasal dari sumber yang utuh baik berupa dokumen, wawancara, dan materi empiris lainnya. Kondensasi data sendiri merupakan bagian dari analisis data yang dapat menajamkan, memfokuskan, dan menyusun data lebih teratur. Pada penelitian ini, penulis melakukan kondensasi data dengan beberapa cara, seperti memilih, meringkas atau memparafrase, ataupun penggolongan data ke dalam suatu pola. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dari dokumen berupa data statistik *gender inequality index* yang dikeluarkan oleh UNDP, juga data-data dari *website* resmi SCWO dan *shadow report* CEDAW. Kemudian, langkah selanjutnya pada kondensasi data adalah menuliskan ringkasan data, mengembangkan tema, dan menghasilkan kategori dari data yang dipilih.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Tahapan kedua, *display data*, tahapan ini merupakan tahapan dimana kumpulan informasi telah terorganisir dan terkompresi sehingga memungkinkan peneliti untuk mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan. Tahapan *display data* ini membantu penulis dalam analisis data untuk lebih memahami apa yang terjadi dan menganalisis apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman data yang ditampilkan. Dalam penyajian data, peneliti menyertakan tabel, grafik, dan juga teks naratif untuk menjelaskan data-data yang ditemukan sebagaimana teknik analisis data yang digagas oleh Miles & Huberman (2014) yang berpendapat bahwa dalam hal penyajian data kualitatif akan lebih

baik jika penyajian data menyertakan tabel dan teks naratif agar data yang diolah lebih valid dimana hal tersebut berguna untuk menggabungkan informasi yang telah disusun (Miles et al., 2014). Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan konsep pengarusutamaan gender khususnya menganalisis tiga tahapan dalam pengarusutamaan gender dan teori liberal institusionalis guna menganalisis tiga peranan institusi dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari melalui hasil studi literatur.

### 3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, tahapan ini merupakan hasil akhir dari tahap awal mulai dari pengambilan data dan interpretasi data hingga muncullah kesimpulan. Kesimpulan “final” tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai (Miles et al., 2014). Dalam tahapan ini, makna yang muncul selama melakukan penelitian akan diuji kebenarannya sebagai bentuk dari validitas data, guna mengecek validitas dan kredibilitas data yang disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik triangulasi data guna menjaga keabsahan dan kebenaran informasi pada penelitian dengan memperoleh data dari tiga sumber yang berbeda dengan sumber utama yaitu UNDP, *website* resmi SCWO, dan dokumen CEDAW *shadow report*. Kemudian, penulis juga menggunakan data tambahan yang bersumber dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional, media daring, serta *website* resmi lainnya sebagai data pendukung dari data sumber utama. Pada tahapan penarikan kesimpulan ini, penulis akan menjabarkan kembali data-data terkait *gender inequality index* yang diperoleh oleh Singapura sejak mengalami penurunan secara konsisten tahun 2000 hingga 2021, selain itu penulis berupaya untuk mendeskripsikan kebijakan, program, dan kerja sama apa saja yang dilakukan Singapura sebagai upaya menekan ketimpangan gender di Singapura yang dianalisis melalui konsep pengarusutamaan gender dan teori liberal institusional.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa keseriusan dan kemampuan Singapura dalam menekan ketimpangan gender berdasarkan perhitungan *gender inequality index* (GII) tercermin dalam upaya Singapura dalam memenuhi tahapan pengarusutamaan gender yaitu tahapan mengadopsi terminologi, tahapan pengambilan kebijakan pengarusutamaan gender, dan tahapan implementasi pengarusutamaan gender dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dibuktikan dengan diadopsinya terminologi pengarusutamaan gender melalui langkah Singapura yang menyetujui dan menandatangani CEDAW pada tanggal 5 Oktober 1995 dan mulai berlaku di Singapura pada tanggal 4 November 1995 yang dengan meratifikasi Konvensi, Singapura memiliki kewajiban untuk melaporkan pada Komite, terkait langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memenuhi tujuannya tersebut secara rutin setiap empat tahun sekali, keseriusan Singapura juga terlihat dengan dibentuknya IMC on CEDAW guna memantau dan memfasilitasi implementasi CEDAW di Singapura.

Kemudian, Singapura menjalankan tahapan pengambilan kebijakan pengarusutamaan gender dengan memenuhi enam prasyarat penting yaitu *political will, specific gender equality policy, statistic, comprehensive knowledge of gender relation, necessary funds and human resources, participation of women in political and public life and in decision making processes* yang dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, beberapa diantaranya adalah *Women's Charter* merupakan undang-undang untuk melindungi dan memajukan hak-hak perempuan dan

anak perempuan di Singapura dan *Employment Act* yang merupakan Undang-Undang ketenagakerjaan yang utama di Singapura, undang-undang ini mengatur syarat dan ketentuan dasar di tempat kerja bagi karyawan yang tercakup dalam Undang-Undang. Serta adanya LSM yang berperan penting dalam menyuarakan kesetaraan gender di Singapura, salah satu LSM yang berpengaruh di Singapura adalah SCWO yang berfungsi untuk menyatukan para perempuan Singapura pada sebuah tujuan yaitu “*equal space, equal voice, and equal worth*”. Selain LSM, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengarusutamakan perspektif kesetaraan gender dalam semua kebijakan dan program, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Singapura dengan mengembangkan strategi nasional yang mencakup tujuan dan indikator kesetaraan gender yang dituangkan dalam sebuah dokumen bernama *White Paper on Singapore Women’s Development*.

Selanjutnya, Singapura juga mengimplementasikan pengarusutamaan gender di berbagai sektor dengan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif baik di sektor ekonomi, salah satunya dengan menetapkan *Tripartite Guidelines on Fair Employment Practice (TGFEP)* dalam undang-undang, pedoman ini membantu perusahaan mengadopsi praktik ketenagakerjaan yang adil dan berdasarkan prestasi. Kemudian sektor pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan. Lalu sektor kesehatan yang ditunjukkan dengan mengembangkan *Child and Maternal Health and Well-Being Strategy and Action Plan* untuk mendukung perempuan dan anak-anak mereka, termasuk memberi setiap wanita hamil akses ke pelayanan perawatan ibu yang berkualitas. Adapun di sektor politik yang dibuktikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam agenda politik berdasarkan prinsip meritokrasi yang memberikan peluang bagi perempuan yang berkompeten untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Kebijakan-kebijakan dan inisiatif tersebut berhasil membuka peluang lebih besar bagi perempuan di Singapura untuk lebih berdaya dan mengurangi ketimpangan gender yang ada di Singapura.

Selain memenuhi tahapan pengarusutamaan gender, kemampuan Singapura dalam menekan GII secara progresif, merupakan hasil dari perpaduan dari kebijakan dan legislasi pemerintah Singapura serta kerja sama dengan institusi baik lokal maupun internasional. Keberadaan institusi berperan dalam menyediakan aliran informasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain, dan memperkuat kesolidan dari kesepakatan internasional. Strategi Singapura melalui peran institusi dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan untuk bernegosiasi ditunjukkan dengan keterlibatan Singapura sebagai salah satu anggota PBB yang memungkinkan Singapura untuk berinteraksi dengan perwakilan dari negara lain. Dalam berbagai program nya, PBB telah menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang membantu pemerintah untuk menilai seberapa jauh komitmen yang telah dipenuhi oleh negara lain ataupun negara sendiri terhadap kesetaraan gender, dengan adanya pemantauan dan evaluasi tersebut setiap negara yang tergabung dalam institusi tersebut dapat mengetahui bagaimana perkembangan yang dilakukan negara lain dalam menghadapi isu terkait, keterlibatan Singapura dalam perjanjian internasional seperti CEDAW, serta mekanisme pelaporan berkala, dan *shadow report* dari LSM membantu menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi terkait kemajuan dan tantangan dalam implementasi komitmen kesetaraan gender.

Kemudian, peran institusi dalam meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain, Institusi dapat membantu pemerintah Singapura dalam mengurangi ketimpangan gender melalui kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal pemerintah Singapura salah satunya dapat terlihat dari masyarakat sipil yang aktif, termasuk organisasi perempuan dan LSM yang aktif dalam isu-isu kesetaraan gender seperti, SCWO yang merupakan badan koordinasi nasional organisasi perempuan di Singapura yang terlibat aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Singapura. Adapun, kekuatan eksternal juga dibutuhkan oleh pemerintah Singapura dalam memonitor kekuatan lain yang dilakukan dengan menjalin kerjasama regional dan internasional, dalam hal ini salah satu langkah langkah Singapura melakukan kerjasama internasional melalui SCWO yang terwakili di berbagai

komite pemerintah dan antar kementerian, juga pada badan-badan regional dan internasional yang menyumbangkan pandangan di bidang keluarga, perempuan, dan kesetaraan gender, seperti *ASEAN Confederation of Women's Organisations* (ACWO) dan *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC), *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), *Asia-Pacific Economic Cooperation Women and the Economic Forum* (APEC-WEF), *UN Commission on the Status of Women* (CSW), *UN Economic and Social Council* .

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kemampuan Singapura dalam menekan *gender inequality index* secara progresif tiap tahunnya merupakan hasil dari perpaduan dari kebijakan dan legislasi progresif yang dilakukan oleh Singapura, namun selain upaya pemerintah, peran institusi, baik lokal maupun internasional, juga krusial dalam membantu Singapura menekan ketimpangan gender. Lebih lanjut, Singapura juga memiliki upaya yang terpadu dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa perempuan di Singapura memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan di Singapura.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan analisis pada pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian terkait strategi Singapura dalam menekan *gender inequality index*, melalui penelitian ini penulis akan memberikan saran kepada akademisi hubungan internasional, khususnya yang memiliki ketertarikan yang sama pada studi gender untuk memberikan kebaruan data dan wawasan yang belum ada pada penelitian ini yang berjudul “Studi Deskriptif Strategi Singapura dalam Menekan *Gender Inequality Index*”. Dengan demikian, diharapkan penelitian berikutnya dapat terus melakukan pembaharuan data pada perhitungan indeks ketimpangan gender yang dilakukan oleh UNDP setiap tahunnya dan meninjau strategi Singapura lebih lanjut dengan laporan terbaru, sehingga penelitian berikutnya dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACWO. (2018). *Vision & Mission ACWO*. <https://acwo.asia/vision-mission/>
- Alami, A. N. (2018). *The Implementation of Gender Mainstreaming in ASEAN*. Vol. 1. <https://jurnal.ugm.ac.id/ikat/article/view/32360#:~:text=The%20study%20finds%20that%20ASEAN,implemented%20extensive%20gender%20mainstreaming%20policies.>
- Alfatih, M. H., Suciati Ningsih, H., & Hanura, M. (2017). KERJASAMA INDONESIA DAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA PERIODE 2009-2014. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i3.16799>
- AWARE. (2007). *CEDAW Shadow Report*. <http://www.aware.org.sg/research-advocacy/>
- AWARE. (2024). *About AWARE*. <https://www.aware.org.sg/about/>
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (5th Edition). Oxford University Press.
- CEDAW. (2021). *Sixth periodic report submitted by Singapore under article 18 of the Convention, due in 2021* (CEDAW/C/SGP/6; p. 44). <https://www.msf.gov.sg/docs/default-source/programmes-document/singapore-sixth-cedaw-periodic-report.pdf>
- Chua, V., Mathews, M., & Loh, Y. C. (2016). Social capital in Singapore: Gender differences, ethnic hierarchies, and their intersection. *Social Networks*. <https://doi.org/doi: 10.1016/j.socnet.2016.06.004>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, Mix Methods Approaches*. SAGE Publication, Inc.

- Dewi, O. M. (2021). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol.17 No.2. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.4111.200-218>
- GIWPS. (2021). *Women Peace and Security Index*. <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/11/WPS-Index-2021.pdf>
- Han, G. Y. (2022). *25 action plans from the White Paper on Singapore Women's Development*. <https://www.straitstimes.com/singapore/25-action-plans-from-the-white-paper-on-singapore-womens-development>
- Huang, S., & Ramdas, K. (2019). Generative spaces of gender and feminist geography in Singapore: Entanglements of the personal and political. *Gender, Place & Culture*. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1552121>
- Institute of Policy Studies. (2021). Upgrading workplace gender diversity... *RRIC*. <https://lkyspp.nus.edu.sg/ips/rric/publication/upgrading-workplace-gender-diversity-avoiding-tokenism-and-measuring-outcomes/>
- Institute of Policy Studies. (2024). *National Population Health Survey (NPHS)*. <https://lkyspp.nus.edu.sg/ips/research/ips-social-lab/national-population-health-survey>
- Jackson, R., & Sorenson, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Fifth Edition).
- Keohane, R. O. (1989). *International Institution and State Power: Essays in International Relations Theory*. Westview Press.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *The MIT Press*, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), 39–51.
- Komnas Perempuan. (2017). *Siaran Pers*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>
- Low, D. C. M., Roberts, H., & Whiting, R. H. (2015). Board gender diversity and firm performance: Empirical evidence from Hong Kong, South Korea, Malaysia and Singapore. *Pacific-Basin Finance Journal*, 35, 381–401. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.02.008>

- Manpower Research and Statistic Department. (2021). *Article: A Gender-Inclusive Workforce*. <https://stats.mom.gov.sg/Pages/a-gender-inclusive-workforce.aspx>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Edition). SAGE Publications, Inc.
- Min, A. H. (2022). *White Paper on Women's Development proposes 25 action plans to be implemented over 10 years*. <https://www.channelnewsasia.com/singapore/white-paper-womens-development-25-action-plans-10-years-2591096>
- Ministry of Education. (2023). *Education Statistics Digest*. <https://www.moe.gov.sg/-/media/files/about-us/education-statistics-digest-2023.pdf>
- Ministry of Manpower. (2023). *Labor Force in Singapore 2023 Edition*. (Sudah)
- Ministry of Manpower. (2024a). *Maternity leave eligibility and entitlement*. Ministry of Manpower Singapore. <https://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/maternity-leave/eligibility-and-entitlement>
- Ministry of Manpower. (2024b). *Paternity leave*. Ministry of Manpower Singapore. <https://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/paternity-leave>
- Moser, C., & Moser, A. (2005). *Gender Mainstreaming Since Beijing: A Review of Success and Limitations in International Institutions*. <https://www.researchgate.net/publication/249028207>
- MSF. (2024a). *MSF | About Celebrating SG Women*. Ministry of Social and Family Development. <https://www.msf.gov.sg/what-we-do/celebrating-sg-women/about-the-movement>
- MSF. (2024b). *Progress on Singapore Women's Development*. <https://www.msf.gov.sg/docs/default-source/research-data/progressonsingaporewomensdevelopmentreport2024.pdf>
- Newman, W. L. (2014). *Social Research Methods (7th ed.)*. Pearson Education Limited.
- NLB. (2021). *Gender Equality*. <https://www.nlb.gov.sg/main/site/read-to-be-sure/what-is-rtbs/volume-2-issue-1-gender-equality>
- OHCHR. (2024a). *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>

- OHCHR. (2024b). *United Nations Human Rights Treaty Bodies* [Dataset].  
[https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en)
- Pakshong, D. I. (1980). *The maternal and child health services in Singapore*.  
[https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/85988/1/AMIC\\_1980\\_10\\_08.pdf](https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/85988/1/AMIC_1980_10_08.pdf)
- SCWO. (2018a). *18 th ACWO Bienal General Assembly and Conference (Acceptance Speech Dr June Goh, President of SCWO)*.  
<https://www.scwo.org.sg/wp-content/uploads/2018/12/Handover-Speech-for-June-Final.pdf>
- SCWO. (2018b). *Singapore takes over ACWO Presidency – 2019 to 2020*.  
<https://www.scwo.org.sg/scwo-at-the-18th-asean-confederation-of-womens-organisations-acwo-biennial-general-assembly-and-conference-2018/>
- SCWO. (2018c). *SPEECH BY ACW SINGAPORE MR RICHARD K T TAN AT THE 18th ACWO GENERAL ASSEMBLY HANDOVER DINNER*.  
<https://www.scwo.org.sg/wp-content/uploads/2018/12/SPEECH-BY-ACW-SINGAPORE-MR-RICHARD-K-T-TAN.pdf>
- SCWO. (2021). *SCWO About Us*. <https://www.scwo.org.sg/about-us/>
- SCWO. (2022a). *Research. SCWO*. <https://www.scwo.org.sg/what-we-do/research/>
- SCWO. (2022b). *Singapore Council of Women's Organisation. What We Do*.  
<https://www.scwo.org.sg/what-we-do/research/>
- SCWO. (2022c). *White Paper on Singapore Women's Development*.  
<https://www.scwo.org.sg/wp-content/uploads/2022/03/White-Paper-on-Singapore-Womens-Development.pdf>
- SCWO. (2024). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Resources*.  
<https://www.scwo.org.sg/resources/cedaw/#:~:text=The%20Singapore%20government%20ratified%20CEDAW,of%20the%20Convention%20in%20Singapore>
- SDGs. (2018). *Towards A Sustainable and Resilient Singapore*.  
[https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19439Singapore\\_s\\_Voluntary\\_National\\_Review\\_Report\\_v2.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19439Singapore_s_Voluntary_National_Review_Report_v2.pdf)
- Singapore MCDYS. (2004). *Singapore's third periodic report to the UN Committee for the Convention on the Elimination of all Forms of*

*Discrimination Against Women.*  
[http://app.mcys.gov.sg/web/faml\\_enablewomen\\_cedaw.asp](http://app.mcys.gov.sg/web/faml_enablewomen_cedaw.asp)

Singapore MCDYS. (2008). *Singapore's fourth periodic report to the UN Committee for the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.*  
[http://app.mcys.gov.sg/web/faml\\_enablewomen\\_cedaw.asp](http://app.mcys.gov.sg/web/faml_enablewomen_cedaw.asp)

Singapore Statutes Online. (2024a). *Child Development Co-Savings Act 2001—Singapore Statutes Online.* <https://sso.agc.gov.sg:5443/Act/CDCSA2001>

Singapore Statutes Online. (2024b). *Employment Act 1968.*  
<https://sso.agc.gov.sg/Act/EmA1968?ProvIds=P19-#P19->

Singapore Statutes Online. (2024c). *Employment Act 1968—Singapore Statutes Online.* <https://sso.agc.gov.sg:5443/Act/EmA1968>

Studio, B. (2016). President's Message: United We Stand. SCWO.  
<https://www.scwo.org.sg/presidents-message-united-we-stand/>

TAFEP. (2024). *Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices.*  
<https://www.tal.sg/tafep/-/media/tal/tafep/getting-started/files/tripartite-guidelines.ashx>

Tan, N. (2016). Why Are Gender Reforms Adopted in Singapore? Party Pragmatism and Electoral Incentives. *Pacific Affairs, a Division of the University of British Columbia.* <https://doi.org/10.5509/2016892369>

UN Women. (2002a). *Progress of the World's Women 2002, Volume 2: Gender Equality and the Millennium Development Goals.* UN Women – Headquarters.  
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2002/1/progress-of-the-world-s-women-2002-volume-2-gender-equality-and-the-millennium-development-goals>

UN Women. (2002b). *Women, War, Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-Building (Progress of the World's Women 2002, Vol. 1).* UN Women – Headquarters.  
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2002/1/women-war-peace-the-independent-experts-assessment-on-the-impact-of-armed-conflict-on-women-and-women-s-role-in-peace-building-progress-of-the-world-s-women-2002-vol-1>

UN Women. (2008). *Progress of the World's Women 2008/2009: Who Answers to Women?* UN Women – Headquarters.  
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2008/1/progress-of-the-world-s-women-2008-2009-who-answers-to-women>

- UN Women. (2011). *Progress of the world's women: In pursuit of justice*. UN Women – Headquarters. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/7/progress-of-the-world-s-women-in-pursuit-of-justice>
- UN Women. (2014). *Beijing Declaration and Platform for Action. Beijing+5 Political Declaration and Outcome*. <https://www.icsspe.org/system/files/Beijing%20Declaration%20and%20Platform%20for%20Action.pdf>
- UN Women. (2015). *Progress of the world's women 2015–2016: Transforming economies, realizing rights*. UN Women – Headquarters. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015>
- UN Women. (2016). *Summary of Proceedings: Regional Consultation with National Women's Machineryes on Strengthening CEDAW Implementation, Monitoring and Accountability*. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ES%20Asia/Docs/Publications/2016/04/National%20Women%20Machineryes.pdf>
- UN Women. (2019). *Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world*. UN Women – Headquarters. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/progress-of-the-worlds-women-2019-2020>
- UN Women. (2024a). *General recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>
- UN Women. (2024b). *Progress of the world's women*. UN Women – Headquarters. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women>
- UNDP. (2020). *What is Beijing Platform for Action?* <https://www.undp.org/ukraine/publications/what-beijing-platform-action>
- UNDP. (2022). *Gender Inequality Index (GII)*. UNDP Human Development Report. <https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII>

- UNESCO. (2024). *Gender Parity Index*.  
<https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/background-document-en.pdf>
- UNHCR. (1998). *Gender Mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices* (EG-S-MS (98) 2; Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming).
- UNHR. (2024). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*.  
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- UNIFEM. (2000). *Progress of the world's women 2000*. UN Women – Headquarters.  
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2000/1/progress-of-the-world-s-women-2000>
- UNIFEM. (2005). *Progress of the World's Women 2005: Women, Work and Poverty*. UN Women – Headquarters.  
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2005/1/progress-of-the-world-s-women-2005-women-work-and-poverty>
- United Nations. (2022). *Conferences, Women and Gender Equality*.  
<https://www.un.org/en/conferences/women>
- United Nations. (2023). *Universal Declaration of Human Rights*.  
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (2024). *Questionnaire to Governments on Implementation of the Beijing Platform for Action (1995) and the Outcome of the Twenty-Third Special Session of the General Assembly (2000)*.  
<https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SINGAPORE-English.pdf>
- University of South Australia. (2010). *Gender Responsive Budgeting in the Asia Pacific Region*.  
<https://www.unisa.edu.au/siteassets/research/src-group/singapore.pdf>
- World Vision International. (2008). *Gender Training Toolkit Second Edition*.  
[https://www.wvi.org/sites/default/files/Gender\\_Training\\_Toolkit.pdf](https://www.wvi.org/sites/default/files/Gender_Training_Toolkit.pdf)